

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**



**DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| BAB I PENDAHULUAN  |         |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1       |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 3       |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....  | 5       |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....  | 5       |
| <br>   |         |
| BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA<br>BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019                    |         |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan<br>Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2019<br>..... | 7       |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota<br>Batam .....   | 18      |
| 2.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....  | 22      |
| <br>   |         |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN<br>KOTA BATAM   |         |
| 3.1. Program dan Kegiatan.....   | 27      |
| <br>   |         |
| BAB IV PENUTUP .....   | 37      |

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan Renstra dan masukan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Musrenbang Kota Batam.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian

dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2019 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan

triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019. Rancangan perubahan renja Renja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran negara nomor 107 dan tambahan lembaran negara RI nomor 4833);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 11) Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- 16) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- 17) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam;
- 18) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

- 19) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- 20) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pertanahan Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan terdiri dari 4 (empat) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas  
Pertanahan Kota Batam Sampai dengan Triwulan II  
Tahun 2019
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota  
Batam
- 2.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- 3.1. Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

## EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tahun 2016 merupakan tahun transisi pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2011-2016 dan rencana strategis 2016-2021, sedangkan tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (triwulan II) dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja adalah mencakup pelaksanaan 5 (lima) kegiatan teknis DPA-SKPD dan 2 (dua) kegiatan rutin (EX BAU) sebagai kegiatan pendukung.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan (dulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam), dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 1.462.485.990,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus

delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 771.175.990,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 691.310.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.218.496.186,- atau 83,32%,- dan realisasi fisik sebesar 94,26%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 1.589.110.600,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 1.003.510.600,- (satu milyar tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 585.600.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.300.516.573,- atau 81,83%,- dan realisasi fisik sebesar 87,42%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp 508.700.500,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 392.550.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 448.697.622,- (empat ratus empat puluh delapan

juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau 88,20%,- dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada tahun 2016 dianggarkan Rp. 596.927.990,- Realisasi keuangan adalah Rp. 456.428.186,- atau 76,46% dan realisasi fisik 93,54%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 679.192.600,- Realisasi keuangan adalah Rp. 580.506.333,- atau 85,47% dan realisasi fisik 88,00%. Sedangkan pada tahun 2018 dianggarkan Rp. 303.911.500,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 249.021.482,- atau 81,94% dan realisasi fisik 100,00%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 174.248.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 155.191.000,- atau 89,06% dan realisasi fisik 100,00%. Sedangkan pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 324.318.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 259.474.400,- atau 80,01% dan realisasi fisik 99,19%. Sedangkan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 88.639.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 84.984.000,- atau 95,88% dan realisasi fisik 100,00%.
- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:
  1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 62.750.000,- Realisasi keuangan adalah 17.425.000,- atau 27,77% dan realisasi fisik 27,77%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 1.713.840,- atau 3,43% dan realisasi fisik 3,43%. Sedangkan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.

- 10.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 8.542.140,- atau 85,42% dan realisasi fisik 100,00%.
2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitas Rumah Ibadah di Kota Batam pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 310.090.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 297.265.000,- atau 95,86% dan realisasi fisik 100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 145.010.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 143.370.000,- atau 98,87% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 0,-.
  3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 212.410.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 202.048.200,- atau 95,12% dan realisasi fisik 100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan anggaran sebesar Rp. 217.220.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 214.820.000,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 0,-.
  4. Kegiatan Fasilitas Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 173.370.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 100.630.000,- atau 58,04% dan realisasi fisik 61,10%. Dilanjutkan di tahun 2018 dengan anggaran Rp. 106.150.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 106.150.000,- atau 100,00% dan realisasi fisik 100,00%.
  5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran Rp. 0,- (rasionalisasi anggaran)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanahan sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

| No. | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)                    | Target Outcome/Output Tahun 2019 |                       | Pagu Anggaran Tahun 2019 |             |                 | Realisasi s/d Triwulan II |      | Keterangan |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------|------------|
|     |  |   | Renja                            | APBD                  | Renja                    | APBD        | Outcome /Output | Rp                        |      |            |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                              | (5)                   | (6)                      | (7)         | (8)             | (9)                       | (10) |            |
|     | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar   |   |                                  |                       |                          |             |                 |                           |      |            |
|     | Bidang/Urusan Pertanahan   |   |                                  |                       |                          |             |                 |                           |      |            |
| 1   | Program Penataan Tata Guna Tanah   | Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal |                                  |                       |                          |             |                 |                           |      |            |
|     | Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam                                      | Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam                               | 33,81% (213 Persil)              | 33,81% (213 Persil)   |                          |             |                 |                           |      |            |
|     | Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah                                    | Jumlah dokumen sertifikat lahan aset Pemko Batam                            | 4,30% (20 Persil)                | 4,30% (20 Persil)     | 252.000.000              | 68.000.000  | -               | 0                         |      |            |
|     | Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat                                       | Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi                 | 100,00 % (630 Persil)            | 100,00 % (630 Persil) | 50.000.000               | 47.600.000  | -               | 0                         |      |            |
|     | Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat  | Jumlah data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi                     | 180 Persil                       | 180 Persil            | 50.000.000               | 47.600.000  | -               | 0                         |      |            |
|     | Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua | Persentase pengadaan PL kampung tua   | 44,12% (15 Kp Tua)               | n.a                   | 27.137.500               | 0           | -               | 0                         |      |            |
|     |  | Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat                                  | 60,00% (300 Dok)                 | 60,00% (300 Dok)      | 168.300.000              | 107.900.000 | 48,84%          | 52.700.000                |      |            |
|     |  | Jumlah lahan masyarakat   | 100 Dok                          | 100 Dok               | 168.300.000              | 107.900.000 | 48,84%          | 52.700.000                |      |            |

| No. | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)  | Target Outcome/Output Tahun 2019   |                                    | Pagu Anggaran Tahun 2019 |                |                 | Realisasi s/d Triwulan II |      | Keterangan |
|-----|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------|------------|
|     |   |   | Renja                              | APBD                               | Renja                    | APBD           | Outcome /Output | Rp                        |      |            |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                                | (5)                                | (6)                      | (7)            | (8)             | (9)                       | (10) |            |
| 2   | Program Penataan Tata Guna Tanah<br>Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam                                     | Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam<br>Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam<br>Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam | 46,00%<br>(23 Persil)<br>10 Persil | 46,00%<br>(23 Persil)<br>10 Persil | 50.000.000               | 49.400.000     | -               | 0                         |      |            |
| 3   | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran<br>Tersedianya sarana administrasi perkantoran   | 100,00%                            | 100,00%                            | 558.577.057,50           | 471.115.662,82 | 53,22%          | 221.786.285               |      |            |
| 4   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur<br>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur  | 100,00%                            | 100,00%                            | 130.010.000              | 112.029.475    | 48,52%          | 44.564.100                |      |            |

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan pada tabel 2.1. diatas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah persentase sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam, dengan target kegiatan 36,98% (sertifikasi 233 persil dari keseluruhan lahan aset 630 persil) selama periode tahun 2016-2021. Realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 197 dokumen (31,27%), dan sampai dengan tahun 2018 realisasi kegiatan adalah 204 dokumen (32,38%). Pada tahun 2019, target pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam adalah 4,30% atau 20 Persil, dan sampai dengan triwulan II kegiatan belum terealisasi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengajuan permohonan lahan kepada Otorita Batam untuk mendapatkan penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Setelah ditetapkannya PL atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Batam (melalui Dinas Pertanahan) mengajukan permohonan sertifikasi lahan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan restrukturisasi organisasi di BP Batam dan belum selesainya penertiban administrasi dokumen lahan di BP Batam menyebabkan pengurusan dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai, hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk pengajuan permohonan sertifikat lahan ke BPN, sehingga realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai target (tidak tercapai).

## 2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah adalah persentase data lahan aset Pemerintah Kota Batam yang diinventarisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100,00%, dengan jumlah lahan aset Pemerintah Kota Batam keseluruhan diperkirakan sebesar 630 persil. Sampai dengan tahun 2016 telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 200 persil. Sampai dengan tahun 2017 capaian kegiatan sebesar 47,62% telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 300 persil, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 450 persil (71,43%).

Pada tahun 2019 target kegiatan adalah inventarisasi lahan aset sejumlah 180 persil, sehingga capaian kinerja kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 100% (630 persil). Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 direncanakan pada bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019 (triwulan III).

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (*fasum*) dan fasilitas sosial (*fasos*) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (*PSU*), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Kebutuhan akan kesamaan data dan informasi, terutama data spasial Kota Batam, pada tahun 2017 ini Dinas Pertanahan juga akan melakukan inventarisasi dan integrasi data spasial Kota Batam dalam rangka menuju *One Map Policy*. Untuk tahap awal kemungkinan data spasial yang diintegrasikan terbatas hanya pada beberapa tema saja, antara lain peta dasar, peta administrasi kota batam, peta jaringan jalan, peta rtrw kota, dan peta sebaran aset lahan pemko batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu



wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

Dengan terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat terkelola dengan baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

3. *Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua*

Kegiatan penyelesaian permasalahan batas kampung tua telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua di 34 lokasi kampung tua Kota Batam. Selain itu telah dilaksanakan juga kegiatan pemasangan patok batas kampung tua yang telah dilaksanakan di 7 (tujuh) kampung tua di tahun 2014, dilanjutkan di tahun 2015 dengan realisasi sebanyak 15 kampung dari target 15 kampung. Lokasi kegiatan meliputi: (1) Kampung Tiawangkan di Kecamatan Sagulung, (2) Kampung Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, (3) Kampung Tereh di Kecamatan Nongsa, (4) Kampung Bakau Serip di Kecamatan Nongsa, (5) Kampung Teluk Lengung di Kecamatan Nongsa, (6) Kampung Bagan di Kecamatan Sei Beduk, (7) Kampung Piayu Laut di Kecamatan Sei Beduk, (8) Kampung Teluk Mata Ikan di Kecamatan Nongsa, (9) Kampung Patam Lestari di Kecamatan Sekupang, (10) Kampung Dapur 12 di Kecamatan Sagulung, (11) Kampung Tembesi di Kecamatan Sagulung, (12) Kampung Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, (13) Kampung Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar, (14) Kampung Sei Tering

di Kecamatan Batu Ampar, dan (15) Kampung Setenggar di Kecamatan Sei Beduk.

Kondisi sampai dengan tahun 2016, telah ditanda tangani 7 (tujuh) Berita Acara Kesepakatan antara pihak terkait (Pemko Batam, BP Batam, dan RKWB) dan telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Kampung Tua Batu Besar, (3) Kampung Tua Kampung Panau, (4) Kampung Tua Tanjung Riau, (5) Kampung Tua Cunting, (6) Kampung Tua Sei Binti, dan (7) Kampung Tua Sei Lekop.

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen PL kampung Tua, yang selama periode tahun 2016-2021 ditargetkan 34 kampung tua diterbitkan dokumen PL atas nama Pemko Batam.

Pada tahun 2017, ditargetkan akan diterbitkan 8 PL kampung tua dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Gundap, (2) Kampung Tua Tiawangkang, (3) Kampung Tua Tereh, (4) Kampung Tua Bakau Serip, (5) Kampung Tua Patam Lestari, (6) Kampung Tua Dapur 12, (7) Kampung Tua Teluk Lunggu, dan (8) Kampung Tua Piayu Laut, dan sampai dengan saat ini baru terbit 1 (satu) surat keterangan dari BP Batam untuk diterbitkan PL di Kampung Tua Bakau Serip. Sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja kegiatan adalah 8 Kampung Tua diterbitkan dokumen PL atas Pemko Batam dari 15 kampung tua yang ditargetkan.

Sedangkan untuk kegiatan penataan kampung tua pada tahun 2018 dilaksanakan dengan swakelola (tanpa anggaran) akibat efisiensi dan rasionalisasi APBD tahun 2018. Untuk tahun 2019 melalui APBD Perubahan telah diusulkan kembali kegiatan penataan di 2 (dua) lokasi kampung tua dan rencana akan direalisasikan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2019.

#### 4. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, dengan target kegiatan 500 persil selama periode tahun 2016-2021. Pada tahun 2017 dan 2018 telah terealisasi pengurusan



dokumen sertifikat lahan masyarakat masing-masing sebanyak 100 persil di tahun 2017 dan 100 persil di tahun 2018.

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat atau disebut juga dengan PRODA, merupakan kegiatan daerah untuk mendukung program PRONA Badan Pertanahan Nasional RI.

PRONA merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara masal.

Kegiatan PRODA/PRONA ini dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan kegiatan PRODA/PRONA ini adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (6) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Pada tahun 2019 realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II adalah telah dilakukan 1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3)

Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi. Sedangkan untuk tahapan ke (5) dan (6) akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019.

##### 5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/ puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Realisasi kegiatan pada tahun 2018 adalah tersedianya lahan aset pemerintah Kota Batam sebanyak 13 persil, yaitu 26,00% dari target renstra 50 persil. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan triwulan II realisasi kegiatan masih nihil dari target 10 persil.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan**

Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Indikator kinerja sasaran Dinas Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2011-2016 ada 2 (dua) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, yaitu: (1) Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dan (2) Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

#### **a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja**

Indikator kinerja pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset. Pada tahun 2019 target kegiatan adalah pengadaan 10 persil lahan aset, dengan target capaian renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 46,00%.

Pada tahun 2019 realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah. Dari hasil koordinasi tersebut akan dilakukan inventarisasi terhadap kebutuhan pengadaan lahan aset tahun 2019.

Indikator kinerja kedua berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 36,98%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak

233 persil dari 630 persil lahan aset yang ada, dan terlaksananya sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 500 persil. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 26,46%, yang terdiri dari 197 dokumen sertifikat lahan aset pemko dan 100 dokumen sertifikat lahan masyarakat. Realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 35,66%, yaitu 204 dokumen sertifikat lahan aset dan 200 dokumen sertifikat lahan masyarakat.

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang pertanahan;
- 2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;

- 3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan dukungan dana pembangunan;
- 4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta perbaikan etos kerja;
- 9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang pertanahan di Kota Batam;

**b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di atas, secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana

kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

### **2.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

#### **a. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 diatas, diketahui sebagian besar kegiatan belum terealisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah tindak lanjut agar kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjelasan secara rinci tindak lanjut dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam**

Adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan restrukturisasi organisasi di BP Batam dan belum selesainya penertiban administrasi dokumen lahan di BP Batam menyebabkan pengurusan dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai, sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam tahun 2019 direncanakan dilaksanakan di wilayah hinterland Kota Batam.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV adalah (1) koordinasi dengan instansi kecamatan/kelurahan di wilayah hinterland, (2) inventarisasi data lahan aset di wilayah hinterland, (3) survey dan pengukuran lahan, (4) pemberkasan dan

pendaftaran dokumen ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Realisasi kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah tahun 2019 sampai dengan triwulan II tahun 2019 masih nihil, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2019.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV adalah (1) inventarisasi dan pengumpulan data awal (data sekunder), (2) survey dan pengukuran lahan, (3) input data hasil inventarisasi ke aplikasi database lahan aset.

3. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Adanya kebijakan Presiden RI untuk mempercepat penyelesaian masalah kampung tua di Kota Batam, pada tahun 2019 ini telah dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Kampung Tua yang anggotanya melibatkan semua stakeholder.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Dinas Pertanahan Kota Batam melalui APBD Perubahan telah diusulkan kembali kegiatan penataan di 2 (dua) lokasi kampung tua, dengan rincian alokasi kegiatan antara lain (1) sewa gedung untuk tim survey dan pengukuran, (2) konsumsi rapat untuk rapat koordinasi tim penyelesaian permasalahan kampung tua, dan (3) pengadaan patok batas kampung tua, yang rencananya akan direalisasikan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2019.

4. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Pada tahun 2019 realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II adalah telah dilakukan 1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan

PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi.

Tindak lanjut yang diperlukan di triwulan III dan IV adalah (1) bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (2) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

#### 5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemo Batam dilaksanakan berdasarkan usulan dan permintaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana Pemko Batam dari dinas/instansi terkait. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II, belum ada usulan dan permintaan kebutuhan lahan dari dinas/instansi terkait.

Pada tahun 2019 tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dan terus dilaksanakan adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

#### **b. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Berikutnya**

Permasalahan atau isu yang dihadapi pada Dinas Pertanahan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dualisme kewenangan di bidang pertanahan, yaitu Pemko Batam dan BP Batam.
2. Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman.

3. Penerapan SK Walikota Batam nomor 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam masih sulit dilaksanakan karena pada sebagian lokasi belum disepakatinya luasan perkampungan tua dengan BP Kawasan.
4. Kampung tua yang memiliki potensi yang besar belum dikelola secara baik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat.
5. Masalah yang dihadapi diperkotaan antara lain; Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, Ganti rugi tanah yang belum memadai, Ganti rugi tanah berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, Terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.
6. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.
7. Masalah yang dihadapi didaerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau - pulau dihinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).
8. Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki dokumentasi legalitas lahan sehingga rawan konflik.
9. Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Berkenaan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi Dinas Pertanahan sebagaimana diuraikan diatas, kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (BP Batam) seperti yang diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, termasuk didalamnya pengaturan wewenang dibidang pertanahan.

- 2) Tersedianya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan.
- 4) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan dukungan anggaran dan personil yang memadai.
- 5) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan Hukum Pertanahan untuk mengurangi sengketa pertanahan;
- 6) Terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 7) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan.

**B A B III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM**

**3.1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebutuhan dana Dinas Pertanahan Tahun 2019 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja perubahan Dinas Pertanahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 841.168.030,00 (delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2019 yang pembiayaannya melalui APBD Perubahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

**1. Program Penataan Tata Guna Tanah**

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

- b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah
- c. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat
- d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua
- e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

## 2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

**Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan Tahun 2019 dan Perubahan Tahun 2019**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Renja dan Pendanaan Tahun 2019  |           |                |           | Renja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2019 |   |                                    |            | Sumber Dana |         |
|------|---|---|-----------|----------------|-----------|--|---|------------------------------------|------------|-------------|---------|
|      |   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  |           | Renja 2019     |           | APBD Murni 2019                          |   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |            |             | Rp.     |
|      |   | Target Kinerja  | Rp.       | Target Kinerja | Rp.       | Target Kinerja                           | Rp.   | Target Kinerja                     | Rp.        |             |         |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)       | (5)            | (6)       | (7)                                      | (8)   | (9)                                | (10)       | (11)        |         |
| 2    | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar                              |   |           |                |           |  |   |                                    |            |             |         |
| 2    | Bidang/Urusan Pertanahan                                      |   |           |                |           |  |   |                                    |            |             |         |
| 2    | Program Penataan Tata Guna Tanah                              |   |           |                |           |  |   |                                    |            |             |         |
| 2    | 10 43   | Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal |           |                |           |  |   |                                    |            |             |         |
| 2    | 10 43 01  | Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam                 | 33,81%    | 315.000.00     | 33,81%    | 68.000.00                                | Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam               | 33,81%                             | 30.000.00  | 0           | APBD II |
| 2    | 10 43 02  | Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah               | 100,00 %  | 125.000.00     | 100,00 %  | 47.600.00                                | Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi | 100,00 %                           | 47.600.00  | 0           | APBD II |
| 2    | 10 43 04  | Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat                  | 60,00%    | 206.300.00     | 60,00%    | 107.900.00                               | Persentase sertifikasi lahan masyarakat                     | 60,00%                             | 107.700.00 | 00          | APBD II |
| 2    | 10 43 03  | Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua   | 44,12%    | 60.445.00      | -         | 0  | Persentase pengadaan PL kampung tua                         | 2 lokasi                           | 174.000.00 | 00          | APBD II |
| 2    | 10 43   | Program Penataan Tata Guna Tanah  |           |                |           |  | Ketersediaan lahan aset Pemko Batam                         |                                    |            |             |         |
| 2    | 10 43 05  | Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam                                   | 90 Persil | 150.000.00     | 90 Persil | 49.400.00                                | Jumlah ketersediaan lahan aset Pemko Batam                  | 10 Persil                          | 49.400.00  | 0           | APBD II |

| Kode    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  | Renja dan Pendanaan Tahun 2019  |                |                |                 | Renja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2019 |   |                |             | Sumber Dana |
|---------|--|---|----------------|----------------|-----------------|--|---|----------------|-------------|-------------|
|         |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Renja 2019     |                | APBD Murni 2019 |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Rp.         |             |
|         |  |   | Target Kinerja | Rp.            | Target Kinerja  | Rp.                                      |   |                |             |             |
| (1)     | (2)  | (3)   | (4)            | (5)            | (6)             | (7)                                      | (8)   | (9)            | (10)        | (11)        |
| 4 0 0 1 | Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran |   |                |                |                 |  |   |                |             |             |
|         | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam                            | 100,00 %       | 648.526.405,17 | 100,00 %        | 471.115.662,82                           | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam                            | 100,00         | 378.063.930 | APBD II     |
| 4 0 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |   |                |                |                 |  |   |                |             |             |
|         | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam | 100,00 %       | 330.010.000    | 100,00 %        | 112.029.475                              | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam | 100,00         | 54.404.100  | APBD II     |

Rincian rencana kerja perubahan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2019 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Hutan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021, target capaian program untuk kegiatan ini adalah jumlah pengadaan dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam sebanyak 233 dokumen dari 630 persil lahan aset pemko Batam (berdasarkan data base tahun 2016).

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skeep, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skeep dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skeep dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2019 sebagai berikut :

|         |   |
|---------|---|
| Input   | : Rp. 30.000.000,-  |
| Output  | : Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 10 Persil |
| Outcome | : Persentase pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam 33,81 persen        |
| Benefit | : Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan  |
| Impact  | : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan                     |

*b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah*

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari periode pembangunan Kota Batam tahun 2011-2016, dimana sampai dengan tahun 2016 (data awal) telah diinventarisasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 200 persil dari 630 persil lahan aset Pemko Batam. Pada periode 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2016-2021, diharapkan seluruh lahan aset Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 630 persil (berdasarkan data base tahun 2016) telah diinventarisasi lokasi dan luasannya.

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan

lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

Rincian rencana kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 47.600.000,-
- Output : Persentase data lahan Pemerintah Kota Batam hasil inventarisasi 100,00%
- Outcome : Data base hasil pengukuran dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam 100.00%
- Benefit : Tersedianya data-data pendukung dalam perencanaan penggunaan lahan
- Impact : Tertib administrasi pertanahan serta memudahkan dalam pemanfaatan lahan

*c. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat*

Kegiatan ini merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (6) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Rincian rencana kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 107.700.000,-
- Output : Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 100 Persil
- Outcome : Persentase pengadaan dokumen lahan masyarakat 60,00 persen

- Benefit : Tertib administrasi pertanahan  
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

*d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua*

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan tercapainya kesepakatan luasan 7 kampung tua Kota Batam dan diterbitkan PL nya oleh BP Batam, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Rangkaian kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan BP Batam dan RKWB mengenai data-data luasan dan kesepakatan terkait kampung tua, (2) Rapat dan sosialisasi kepada masyarakat kampung tua mengenai rencana pengusulan dokumen PL kampung tua atas nama Pemko Batam, (3) Sosialisasi mengenai kebijakan dan tindak lanjut pengembangan kampung tua Kota Batam dengan peserta seluruh stakeholders, (4) Pengusulan dokumen PL Kampung Tua ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 174.000.000,-  
Output : Jumlah Kampung Tua yang dilakukan penataan 2 lokasi  
Outcome : Persentase penyelesaian kampung tua sebesar 44,12%  
Benefit : Memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai  
Impact : Peningkatan perekonomian masyarakat kampung tua

*e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam*

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini

bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam tahun 2019 sebagai berikut :

|         |  |
|---------|--|
| Input   | : Rp. 49.400.000,-   |
| Output  | : Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam<br>10 persil                       |
| Outcome | : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko<br>Batam 46,00%                   |
| Benefit | : Memudahkan dalam pembangunan sarana<br>dan prasarana Pemerintah Kota Batam |
| Impact  | : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan<br>pembangunan                     |

## 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

### a. *Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas,

belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 378.063.930,-
- Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 54.404.100,-
- Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

## B A B I V

### P E N U T U P

Dokumen Renja Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2019. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2019.

Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan pencapaian indikator renstra sampai dengan triwulan II tahun 2019.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2019, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta Rempang dan Galang pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**Batam, Agustus 2019**

**KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,**

  
**ASPAWI NANGALI, S.Sos**  
Pembina TK I NIP. 19640509 198603 1 015

Lampiran 1.

**PERBANDINGAN RKPD MURNI DAN RKPD PERUBAHAN**

| OPD                         | Program  | Kegiatan   | Murni   |        |            | Perubahan   |        |          |  |
|-----------------------------|--|--|---|--------|------------|---|--------|----------|--|
|                             |  |  | Usulan  | Lokasi | Pagu       | Usulan  | Lokasi | Pagu     | Alasan   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 orang 12 bulan                   | Batam  | 38400000   | Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 orang 12 bulan                   | Batam  | 35400000 | Sesuai SSH   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis 1 Paket | Batam  | 51918092,5 | Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis 1 Paket | Batam  | 64577450 | penambahan belanja ATK untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penataan kampung tua |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket                | Batam  | 6903265    | Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket                | Batam  | 4723000  | rasionalisasi  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket                     | Batam  | 4800000    | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket                     | Batam  | 4200000  | sesuai kebutuhan   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket                    | Batam  | 8316300    | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket                    | Batam  | 3390200  | rasionalisasi  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 4 Unit 12 Bulan                          | Batam  | 78276000   | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 4 Unit 12 Bulan                          | Batam  | 43797600 | rasionalisasi  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Rekening Telepon 12 bulan   | Batam  | 9600000    | Belanja Rekening Telepon 12 bulan   | Batam  | 3000000  | sesuai kebutuhan   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 9 bulan                 | Batam  | 8100000    | Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 9 bulan                 | Batam  | 3822000  | rasionalisasi  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili 12 bulan                   | Batam  | 12000000   | Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili 12 bulan                   | Batam  | 0        | internet dari Dinas Kominfo  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Propoganda, Promosi, Pameran dan iklan 10 buah                      | Batam  | 1050000    | Belanja Propoganda, Promosi, Pameran dan iklan 10 buah                      | Batam  | 175000   | rasionalisasi  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1 orang 12 bulan                           | Batam  | 1800000    | Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1 orang 12 bulan                           | Batam  | 1370280  | sesuai SSH   |

| OPD                         | Program  | Kegiatan   | Murni   |        |           | Perubahan   |        |           |                  |
|-----------------------------|--|--|---|--------|-----------|---|--------|-----------|------------------|
|                             |  |  | Usulan  | Lokasi | Pagu      | Usulan  | Lokasi | Pagu      | Alasan           |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket   | Batam  | 9663400   | Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket   | Batam  | 6963400   | sesuai kebutuhan |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 28 Tim   | Batam  | 50640000  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 28 Tim   | Batam  | 39075000  | sesuai kebutuhan |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35 Orang Kali (OK)   | Batam  | 270060000 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35 Orang Kali (OK)   | Batam  | 165000000 | rasionalisasi    |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Pajak Daerah 4 Unit Kendaraan   | Batam  | 5850000   | Belanja Pajak Daerah 4 Unit Kendaraan   | Batam  | 1850000   | sesuai kebutuhan |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Belanja Retribusi Daerah 12 bulan   | Batam  | 1200000   | Belanja Retribusi Daerah 12 bulan   | Batam  | 720000    | sesuai kebutuhan |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Belanja Sewa Alat Angkut Darat Dalam Rangka Pawai Kendaraan Bermotor 3 Kali                                 | Batam  | 35000000  | Belanja Sewa Alat Angkut Darat Dalam Rangka Pawai Kendaraan Bermotor 3 Kali                                 | Batam  | 0         | rasionalisasi    |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 4 Unit  | Batam  | 19360000  | Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 4 Unit  | Batam  | 22800000  | sesuai SSH       |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor 1 paket  | Batam  | 60000000  | Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor 1 paket  | Batam  | 23044100  | rasionalisasi    |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin fotocopy, komputer/notebook, printer, dll) 1 Paket | Batam  | 15650000  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin fotocopy, komputer/notebook, printer, dll) 1 Paket | Batam  | 8560000   | rasionalisasi    |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 0.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (GPS Geodetik)   | Batam  | 0         | Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (GPS Geodetik)   | Batam  | 0         |                  |

| OPD                         | Program  | Kegiatan   | Murni   |                        |           | Perubahan   |                        |           |   |
|-----------------------------|--|--|---|------------------------|-----------|---|------------------------|-----------|---|
|                             |  |  | Usulan  | Lokasi                 | Pagu      | Usulan  | Lokasi                 | Pagu      |   |
|                             |  |  | Alasan  |                        |           |   |                        |           |   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 01. - Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam   | Belanja Jasa Sertifikasi (105 persil lahan aset)  | Batam                  | 252000000 | Belanja Jasa Sertifikasi (105 persil lahan aset)  | Batam                  | 300000000 | Terkendala belum terbitnya PL, SPJ Skep dan Rekomendasi dari BP Batam untuk lahan aset yang berlokasi di wilayah mainland, maka pengadaan dokumen lahan aset difokuskan di wilayah hinterland |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 02. - Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah | Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer (jasa konsultansi updating data base aset berbasis SIG) 1 Paket | Batam                  | 0         | Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer (jasa konsultansi updating data base aset berbasis SIG) 1 Paket | Batam                  | 0         |   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 02. - Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 1 Paket   | Batam                  | 50000000  | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 1 Paket   | Batam                  | 476000000 | sesuai KAK/TOR  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 03. - Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat   | Belanja Jasa Sertifikasi (100 bidang)   | Batam                  | 56000000  | Belanja Jasa Sertifikasi (100 bidang)   | Batam                  | 55000000  | sesuai SSH  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 03. - Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat   | Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan untuk Sosialisasi 1 Paket   | Batam                  | 6300000   | Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan untuk Sosialisasi 1 Paket   | Batam                  | 6300000   |   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 03. - Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat   | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 1 Paket   | Batam                  | 50000000  | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 1 Paket   | Batam                  | 46400000  | sesuai KAK/TOR  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 03. - Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat   | Belanja Jasa Sertifikasi  | Kelurahan Tanjung Sari | 56000000  | Belanja Jasa Sertifikasi  | Kelurahan Tanjung Sari | 0         | telah diakomodir di renja OPD   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua                           | Honorarium Jasa Narasumber (Sosialisasi) 1 orang  | Batam                  | 1800000   | Honorarium Jasa Narasumber (Sosialisasi) 1 orang  | Batam                  | 0         | rasionalisasi   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua                           | Belanja Perlengkapan Peserta Sosialisasi 1 Paket  | Batam                  | 4800000   | Belanja Perlengkapan Peserta Sosialisasi 1 Paket  | Batam                  | 0         | rasionalisasi   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua                           | Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (Spanduk Sosialisasi) 2 buah                               | Batam                  | 350000    | Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (Spanduk Sosialisasi) 2 buah                               | Batam                  | 0         | rasionalisasi   |

| OPD                         | Program  | Kegiatan                               | Murni  |   |          | Perubahan  |   |          |   |
|-----------------------------|--|--|--|---|----------|--|---|----------|---|
|                             |  |  | Usulan   | Lokasi  | Pagu     | Usulan   | Lokasi  | Pagu     | Alasan  |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       | Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan 1 Paket  | Batam   | 16100000 | Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan 1 Paket  | Batam   | 94500000 | sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian kampung tua Kota Batam |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       | Belanja Transportasi Udara (Narasumber Sosialisasi) 1 orang  | Batam   | 2787500  | Belanja Transportasi Udara (Narasumber Sosialisasi) 1 orang  | Batam   | 0        | 0 rasionalisasi   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       | Belanja Transportasi Air (Narasumber Sosialisasi)  | Batam   | 0        | Belanja Transportasi Air (Narasumber Sosialisasi)  | Batam   | 0        |   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       | Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (Narasumber Sosialisasi) 1 orang  | Batam   | 1300000  | Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (Narasumber Sosialisasi) 1 orang  | Batam   | 0        | 0 rasionalisasi   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       | Pemetaan Lahan Kampung Tua Batu Merah, Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23,                                 | Kampung Tua Batu Merah  | 0        | Pemetaan Lahan Kampung Tua Batu Merah, Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23,                                 | Kampung Tua Batu Merah  | 0        |   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       | Menuntut Hak atas kewenangan BP Batam, di Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Lahan Kampung Tua Batu Merah | Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Kel. Batu Merah/Kec. Batu Ampar | 0        | Menuntut Hak atas kewenangan BP Batam, di Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Lahan Kampung Tua Batu Merah | Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Kel. Batu Merah/Kec. Batu Ampar | 0        |   |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       |  |   | 0        | Belanja Sewa Kantor dan Gedung   | Batam   | 34000000 | Untuk Menunjang Kegiatan Kampung Tua                              |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 04. - Penataan Lahan Kampung Tua       |  |   | 0        | Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga   | Batam   | 45500000 | Untuk Menunjang Kegiatan Kampung Tua                              |
| DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM | 1.02.04.15. - Program Penataan Tata Guna Tanah | 07. - Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam | Belanja Jasa Pihak Ketiga 1 Paket  | Batam   | 50000000 | Belanja Jasa Pihak Ketiga 1 Paket  | Batam   | 49400000 | sesuai KAK/TOR  |